

Faktor-Faktor Penyebab Gagalnya Pembangunan Kawasan Pedesaan Berorientasi Ekowisata, Pembelajaran dari 3 Desa, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar

Ilman Harun

Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota

Institut Teknologi Sepuluh Nopember

e-mail: Ilman.harun@its.ac.id

Abstrak—Program pembangunan desa dewasa ini sudah menjadi program pembangunan utama dan strategis di banyak negara, sebagai negara yang memiliki jumlah desa lebih dari delapan puluh ribu dengan beragam potensi alamnya, apabila hal ini dikembangkan secara berkelanjutan, dapat berpotensi menjadi penghasil devisa terbesar sebagai pengganti ekspor migas. Melalui Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melakukan percepatan pembangunan sebagian wilayah pedesaan, Atas dasar kewenangan tersebut serta ditunjang dengan potensi ekowisata dan agrikultur yang dimiliki, Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar menetapkan 3 desa di dalam Kecamatan Kesamben yang memiliki kesamaan dalam karakteristik potensi ekowisata, untuk dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Kawasan Pedesaan yang berorientasi pada pengembangan ekowisata. Namun setelah 5 tahun berjalan sejak rencana pembangunan kawasan pedesaan tersebut ditetapkan, implementasi program-program dalam rencana tersebut jauh dari kata berhasil. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi apa saja hambatan dan tantangan pada pelaksanaan pembangunan kawasan pedesaan, dalam studi kasus ini, berorientasi pada pengembangan Ekowisata di 3 desa di Kecamatan Kesamben. Dengan belum banyaknya kajian terhadap faktor apa saja yang menghambat implementasi program pembangunan kawasan pedesaan, khususnya yang berorientasi pada ekowisata, menjadikan penelitian ini penting untuk mengisi gap analisa berdasarkan evaluasi temuan-temuan permasalahan riil di lapangan. Penelitian ini merupakan salah satu bentuk Monitoring dan Evaluasi implementasi pembangunan kawasan pedesaan melalui pendekatan kualitatif induktif. Pada Penelitian ini terdapat 2 metode analisa yang digunakan yaitu konten analisa untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pembangunan kawasan desa dan analisa Analytical Hierarchy Process (AHP) untuk menstratifikasi tingkat urgensi faktor tersebut. Sehingga hasil akhir dari penelitian ini dapat menyimpulkan faktor-faktor krusial apa yang menjadi hambatan dan tantangan dalam implementasi pembangunan kawasan pedesaan yang berorientasi pada ekowisata di 3 desa tersebut.

Kata Kunci—Desa Wisata, Ekowisata, Pengembangan Desa

I. PENDAHULUAN

PROGRAM pembangunan desa dewasa ini sudah menjadi program pembangunan utama dan strategis di berbagai negara [1], tidak hanya sebagai motor utama pengentasan kemiskinan melalui sektor pertanian di Indonesia [2], tetapi juga berkontribusi terhadap produk domestic bruto (PDB) sebesar 3,25% dari total PDB Indonesia melalui sektor pariwisata. Beragamnya daya tarik wisata yang tersebar di kawasan pedesaan dapat mendukung kapitalisasi sumber-sumber daya lokal yang menjamin ketahanan ekonomi suatu wilayah [3]. Serta apabila dikembangkan secara berkelanjutan, dapat berpotensi menjadi penghasil devisa terbesar sebagai pengganti ekspor migas [4]. Oleh karenanya, sebagai negara yang memiliki lebih dari delapan puluh ribu desa (BPS, 2015) dengan beragam potensi dan sumberdayanya, percepatan pembangunan kawasan pedesaan sudah menjadi suatu kebutuhan pembangunan nasional sehingga cita-cita akan keseimbangan pertumbuhan antara desa dan kota dapat tercapai melalui sinergitas, distribusi dan diversifikasi perannya masing-masing

Melalui Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melakukan percepatan pembangunan sebagian wilayah pedesaan, Undang-undang tersebut, menjadi dasar dalam menjelaskan kedudukan dan relasi sebuah desa dengan daerah dan pemerintah yang meliputi aspek kewenangan, perencanaan, pembangunan, keuangan dan demokrasi desa [5]. Sejalan dengan hal tersebut, dalam Pasal 83 UU No 6 Tahun 2014, dijelaskan bahwa Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah pembangunan antar-Desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

Atas dasar kewenangan tersebut serta ditunjang dengan potensi ekowisata dan agrikultur yang dimiliki sebagai daya tarik dan mesin perputaran perekonomian, Pemerintah Daerah

Kabupaten Blitar menetapkan 3 desa di Kecamatan Kesamben yang memiliki kesamaan potensi ekowisata, yaitu desa Jugo, desa Pagergunung dan desa Sukoanyar untuk dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Kawasan Pedesaan yang berorientasi pada pengembangan ekowisata sebagai inisiasi usaha percepatan pembangunan pedesaan melalui sinergi 3 desa untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa, perputaran perekonomian, dan pendapatan desa.

Setelah 5 tahun berjalan sejak rencana pembangunan kawasan pedesaan berbasis ekowisata ini ditetapkan oleh PEMKAB Blitar, implementasi program-program dalam rencana tersebut jauh dari kata berhasil berdasarkan hasil observasi langsung serta studi dokumen terkait yang dilakukan oleh tim peneliti. Hal ini terlihat dari tidak berjalannya mayoritas rencana aksi dan indikasi program pembangunan ekowisata yang sudah ditetapkan. Sehingga muncul pertanyaan penelitian, faktor apa yang membuat rencana pembangunan kawasan pedesaan yang berorientasi ekowisata ini sulit untuk diimplementasikan, serta hambatan dan permasalahan apa yang timbul di dalam prosesnya.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi apa saja hambatan dan tantangan pada pelaksanaan pembangunan kawasan pedesaan, yang dalam studi kasus ini, berorientasi pada pengembangan Ekowisata di 3 desa yang sudah ditetapkan, serta memetakan dan menstratifikasikan tingkat prioritas permasalahan dan hambatan yang timbul selama proses implementasinya.

Di sisi lain, perencanaan dan implementasi pembangunan desa berbasis ekowisata adalah dua hal yang berbeda, oleh karena itu dibutuhkan pendekatan baru yang bisa mengartikulasikan baik sumber daya alam dan pertanian dengan aspek budaya dan sosial yang berlaku [3]. Beberapa kajian terkait pembangunan desa ekowisata menunjukkan belum optimalnya pemanfaatan sumber daya alam yang ada oleh masyarakat [6]. Namun, belum adanya kajian terhadap faktor-faktor yang menghambat implementasi program-program pembangunan kawasan pedesaan khususnya yang berorientasi pada ekowisata menjadikan penelitian ini cukup penting untuk mengisi gap analisa berdasarkan evaluasi temuan-temuan permasalahan riil apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Terlebih di era dimana sistem informasi dan ekonomi sudah terbuka dan kehidupan berpolitik yang lebih demokratis seperti sekarang ini, menjadikan implementasi pembangunan kawasan desa menjadi tantangan yang tidak mudah di masa depan [7].

Dengan adanya evaluasi terhadap implementasi pembangunan desa ekowisata pada studi kasus 3 desa ini, diharapkan dapat menjadi referensi empiris untuk memitigasi hambatan dan tantangan-tantangan yang akan muncul dalam perencanaan pembangunan kawasan desa ekowisata di tempat lain, untuk merespon meningkatnya pasar wisatawan ekowisata sebagai dampak bergesernya konsep pariwisata di dunia dari *mass tourism* menjadi *alternative tourism* [8] yang tentunya menjadi fenomena yang sangat menguntungkan bagi negara-negara seperti Indonesia yang dianugrahi potensi alam yang

berlimpah.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan salah satu bentuk Monitoring dan Evaluasi implementasi pembangunan kawasan pedesaan pada sebuah studi kasus 3 desa yang tergabung dalam kawasan ekowisata di kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar melalui pendekatan kualitatif induktif.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat di 3 desa yang tergabung dalam kawasan desa Ekowisata, dikarenakan jenis penelitian ini adalah monitoring dan evaluasi implementasi pembangunan sarana dan prasarana kawasan pedesaan, pengambilan sampel penelitian ini menggunakan pendekatan *purposive sampling* pada *stakeholder* yang memiliki derajat kepentingan, pengaruh, serta terdampak oleh implementasi program pembangunan kawasan pedesaan tersebut. Dengan menggunakan *stakeholder analysis* sebagai teknik *sampling*, dipilih 3 *stakeholder* sebagai sampel pada masing-masing desa yaitu :

- 1) Kepala Desa yang mewakili pemilik otoritas sebagai *stakeholder* yang berpengaruh pada program pembangunan tersebut
- 2) Ketua BUMDES yang mewakili pelaku usaha sebagai *stakeholder* yang berkepentingan pada program pembangunan tersebut
- 3) POKDARWIS yang mewakili masyarakat sebagai *stakeholder* yang terdampak oleh program pembangunan tersebut.

Penelitian ini dilaksanakan di 3 desa yang masuk dalam kawasan desa Ekowisata yaitu desa Jugo, desa Pagergunung dan desa Sukoanyar yang terletak di kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar. Penelitian ini berlangsung selama 3 bulan dimulai pada bulan Oktober dan berakhir di bulan Desember 2022.

Prosedur penelitian yang digunakan terbagi menjadi 2 tahap, tahap pertama, metode *content analysis* digunakan untuk menganalisa keseluruhan transkrip wawancara seluruh *stakeholder* yang menjadi sampel penelitian pada masing-masing desa untuk mengidentifikasi apa saja hambatan dan tantangan pada pelaksanaan pembangunan kawasan pedesaan. Pada tahap kedua, metode Analytical Hierarchy Process (AHP) digunakan untuk menganalisa hasil dari proses analisa tahap pertama untuk memetakan dan menstratifikasikan tingkat urgensi faktor-faktor penyebab gagalnya implementasi program pembangunan kawasan pedesaan, yang dalam studi kasus ini berorientasi pada pengembangan ekowisata di 3 desa.

Teknik Pengumpulan data menggunakan pendekatan triangulasi sebagai upaya menjaga validitas data melalui penggunaan dua metode pengumpulan data yang berbeda pada objek yang sama. Pertama, dilakukan wawancara terstruktur dan terbuka terhadap 3 *stakeholder* sampel yang berbeda di setiap desa populasi. Dan yang kedua, melakukan observasi secara terstruktur dan tertutup. Wawancara dilakukan secara terstruktur dengan penggunaan panduan pertanyaan untuk mencari hubungan sebab akibat antara indikasi program pembangunan kawasan yang sudah ditetapkan sebagai variabel terikat dan permasalahan serta hambatan implementasinya

sebagai variabel bebas, *interview* juga dilakukan secara terbuka untuk memberikan peluang terhadap penjelasan-penjelasan tambahan dari 3 perspektif yang berbeda pada objek yang sama di setiap desa. Pada waktu yang bersamaan observasi secara struktur dan tertutup juga dilakukan di setiap lokasi indikasi program pembangunan ekowisata yang tersebar di 3 desa untuk mevalidasi kebenaran data-data yang didapat selama proses *interview*. Pada tahap selanjutnya, data-data yang didapat melalui proses *coding* pada tahap *content analysis* di kelompokkan menurut kesamaan tema. Tema-tema yang sudah dikelompokkan kemudian digunakan sebagai input teknik pembobotan analisa Analytical Hierarchy Process (AHP), dimana tema yang lebih sering muncul dalam proses *interview*, diberikan bobot yang lebih tinggi.

III. HASIL DAN DISKUSI

A. Ringkasan Data Temuan dan Analisa

Berdasarkan hasil wawancara mendalam, kepada 3 *stakeholder* berbeda yang terdiri dari perangkat desa, pokdarwis, dan BUMDES dari ke tiga desa yang tergabung dalam kawasan pedesaan dan memiliki lokasi objek ekowisata yang dikembangkan sebagai berikut :

- 1) Desa Jugo
 - Wisata Padepokan Eyang Jugo.
 - Wisata Persawahan dan Pinggir Sungai Brantas.
- 2) Desa Pagergunung
 - Wisata Sumber Tretes
 - Wisata Ondok Sewu
- 3) Desa Sukoanyar
 - Konyar Hill

Tabel 1. Permasalahan Implementasi Pembangunan Ekowisata Desa Jugo

Wisata Padepokan Eyang Jugo	
Permasalahan	Aspek
Produksi Batik Belum Skala Industri	Atraksi Wisata
Belum Ada Pengembangan Kuliner Khas	
BUMDES Belum Berjalan	SDM
Belum Ada Sosialisasi Ekowisata pada Masyarakat	
Belum Ada Manajemen Profesional	Pengelolaan
Belum ada Penggunaan Teknologi Digital	Branding
Belum adanya Marketing Ekowisata	
Belum Ada Pembangunan Pusat Kawasan	Infrastruktur
Belum Ada Kawasan Kuliner	
Wisata Sawah dan Bantaran Sungai Brantas	
Permasalahan	Aspek
Belum Ada Pengembangan Kuliner Khas	Atraksi Wisata
Kondisi Bantaran Sungai masih kurang layak dikunjungi	
Riwayat Potensi Banjir	
Pengurus BUMDES tidak Optimal	SDM
Paket Wisata tidak berjalan Optimal	
Pelatihan Wisata tidak Spesifik	
Belum Ada POKDARWIS	
Belum ada Penggunaan Teknologi Digital	Branding
Kurangnya Promosi	

Belum Ada Infrastruktur Kawasan Wisata

Infrastruktur

Tabel 2. Permasalahan Implementasi Pembangunan Ekowisata Desa Pagergunung

Wisata Sumber Tretes	
Permasalahan	Aspek
Jalan Rusak	Infrastruktur
Tidak Ada Pusat Informasi	
Tidak Ada Lampu Penerangan	
Minimnya Minat Masyarakat untuk Mengelola	SDM
Minimnya Peran serta Pemuda	
Tidak adanya Konsistensi Pengelolaan	
Tidak Ada SDM berpengalaman dalam Ekowisata	
Minimnya Pelatihan Pariwisata	
Hanya Dibuka saat weekend	Pengelolaan
Tidak ada Sinergi BUMDESMA 3 Desa	
Kurangnya Income dari Wisatawan	Wisatawan
Tidak ada CSR	Pendanaan
Hanya Bergantung APBDes	
Tidak ada Promosi	Branding
Tidak ada Pusat Kuliner sebagai Penunjang Wisata	Atraksi

Wisata Sawah dan Bantaran Sungai Brantas

Permasalahan	Aspek
Belum Ada Pengembangan Kuliner Khas	Atraksi Wisata
Kondisi Bantaran Sungai masih kurang layak dikunjungi	
Riwayat Potensi Banjir	
Pengurus BUMDES tidak Optimal	SDM
Paket Wisata tidak berjalan Optimal	
Pelatihan Wisata tidak Spesifik	
Belum Ada POKDARWIS	
Belum ada Penggunaan Teknologi Digital	Branding
Kurangnya Promosi	
Belum Ada Infrastruktur Kawasan Wisata	Infrastruktur

Tabel 3. Permasalahan Implementasi Pembangunan Ekowisata Desa Sukoanyar

Wisata Konyar Hill	
Permasalahan	Aspek
Kepemilikan 100 % Milik Swasta	Pengelolaan
Belum Adanya Perjanjian Kerjasama antara Pemilik dengan Pihak Desa	
Sudah Tidak Beroperasi semenjak Pandemi Covid	
Tidak ada SDM yang berpengalaman	Kelembagaan dan SDM
Tidak SDM yang Mengembangkan	
Bangunan Eksisting Tidak Terawat	Infrastruktur
Minimnya Infrastruktur Listrik	

Untuk memetakan dan menstarifikasi tingkat prioritas permasalahan implementasi pembangunan objek ekowisata di masing-masing desa, dilakukan analisa AHP. Analisis ini

memiliki input berupa identifikasi masalah yang didapatkan dari konten analisis yang kemudian di analisis Kembali dengan pembobotan setiap masalah pada masing-masing objek wisata. Sehingga berdasarkan penilaian AHP ini, hasil analisa penyebab utama gagalnya implementasi pembangunan kawasan Ekowisata pada masing-masing desa sebagai berikut :

Tabel 4. Hasil AHP Faktor Penyebab Gagalnya Implementasi Pembangunan Ekowisata Padepokan Eyang Jugo

Kriteria	Skor	Alternatif	Skor
SDM	41%	- Tidak adanya motivasi dan penyeselarasan visi kepada masyarakat untuk mengelola wisata	75%
		- Pengurus BUMDES masih belum berjalan	25%
Pengelolaan	31%	- Tidak ada manajemen profesional	100%
Branding	14%	- Belum ada penggunaan teknologi digital (Media sosial)	67%
		- Belum adanya marketing yang berjalan	33%
Atraksi Wisata	7%	- Produksi Batik Belum Skala Industri	
		- Belum Ada Pengembangan Kuliner Khas	
Infrastruktur	7%	- Belum Ada Pembangunan Pusat Kawasan	
		- Belum Ada Kawasan Kuliner	

Wisata padepokan Eyang Jugo adalah wisata berbasis sejarah dan religi yang teretak di Desa Jugo, wisata ini secara garis besar memiliki potensi sejarah Eyang Jugo yang menarik wisatawan. Namun disamping itu, berdasarkan hasil analisa AHP yang telah dilakukan, Faktor penyebab utama gagalnya implementasi pembangunan ekowisata di Padepokan Eyang Jugo selama ini adalah belum adanya keterlibatan peran masyarakat baik dari kapasitas sumber daya manusianya maupun dalam manajemen pengelolaan Padepokan Eyang Jugo. Hal ini disebabkan belum berjalannya sosialisasi dan pelarasan visi misi pengembangan wisata kepada masyarakat desa Jugo, sehingga pengembangan inovasi, *branding* dan marketing kawasan wisata ini belum berjalan.

Tabel 5. Hasil AHP Faktor Penyebab Gagalnya Implementasi Pembangunan Ekowisata Persawahan dan Pinggir Sungai Brantas

Kriteria	Skor	Alternatif	Skor
SDM	48%	- Belum Ada POKDARWIS	49%
		- Pengurus BUMDES tidak Optimal	31%
		- Pelatihan Wisata tidak Spesifik pada keahlian tertentu	12%

		- Paket Wisata tidak berjalan Optimal	8%
Atraksi Wisata	29%	- Riwayat Potensi Banjir	66%
		- Kondisi Bantaran Sungai masih kurang layak dikunjungi	20%
		- Belum Ada Pengembangan Kuliner Khas	14%
Infrastruktur	16%	- Belum Ada Infrastruktur Kawasan Wisata	67%
		- Infrastruktur Rawan Hancur karena Banjir	33%
Branding	7%	- Belum ada Penggunaan Teknologi Digital	
		- Kurangnya Promosi	

Berdasarkan hasil analisis masalah, diketahui yang menjadi faktor utama yang menghambat implementasi pembangunan ekowisata persawahan dan pinggir sungai Brantas adalah belum optimalnya pengelolaan SDM disebabkan karena belum adanya kelembagaan yang kuat dan minimnya pengembangan SDM khususnya keahlian pelayanan di bidang Ekowisata. Selain itu Juga diperlukan ada kajian Mitigasi banjir yang harus diperhatikan dalam pengembangan wisata. Sehingga dapat menjadi acuan dalam pembangunan kawasan infrastruktur ekowisata.

Tabel 6. Hasil AHP Faktor Penyebab Gagalnya Implementasi Pembangunan Ekowisata Sumber Tretes

Kriteria	Skor	Alternatif	Skor
SDM	37%	- SDM yang ingin mengelola sangat sedikit	28%
		- Pemuda enggan menjadi pengelola wisata	28%
		- Tidak adanya Konsistensi Pengelolaan	17%
		- Minimnya Pelatihan Pariwisata	14%
		- Tidak Ada SDM berpengalaman dalam Ekowisata	13%
Pendanaan	25%	- Hanya Bergantung APBDes	67%
		- Tidak ada CSR	33%
Infrastruktur	14%	- Jalan Rusak	55%
		- Tidak Ada Pusat Informasi	24%
		- Tidak Ada Lampu Penerangan	21%
Pengelolaan	9%	- Wisata Hanya Dibuka saat weekend	
		- Tidak ada Sinergi BUMDESMA 3 Desa	
Branding	9%	- Tidak ada Promosi	
Atraksi	4%	- Tidak ada Pusat Kuliner sebagai Penunjang Wisata	

Wisatawan	4%	-	Wisatawan yang datang belum memberikan income
-----------	----	---	---

Dari masalah tersebut, diketahui kurang sertanya keterlibatan masyarakat dalam mengelola kawasan ekowisata Sumber Tretes menjadi faktor utama yang menghambat pembangunan ekowisata Sumber Tretes, terutama dikarenakan rendahnya motivasi Pemuda untuk terlibat dan keterbatasan kemampuan SDM di bidang Ekowisata. Selain itu, minimnya keterlibatan kelompok-kelompok usaha masyarakat dalam mengelola dan mengembangkan kawasan ekowisata Sumber Tretes menjadikan cashflow hanya bergantung pada APBDes yang membuat pembangunan infrastruktur wisata menjadi tidak maksimal.

Tabel 7. Hasil AHP Faktor Penyebab Gagalnya Implementasi Pembangunan Ekowisata Ondok Sewu

Kriteria	Skor	Alternatif	Skor
Pengelolaan	51%	- Pencetus rencana pengembangan Ondok Sewu adalah kepala desa yang lama	67%
		- Bukan Menjadi Prioritas Desa saat ini	33%
SDM	19%	- SDM yang ingin mengelola sangat sedikit	67%
		- Pemuda enggan menjadi pengelola wisata	33%
Infrastruktur	19%	- Belum Dibangun Akses menuju Lokasi	100%
Wisatawan	11%	- Segmented bagi wisatawan dibawah 50 tahun	

Berdasarkan hasil analisis prioritas, masalah utama pada destinasi Ondok Sewu adalah pengelolaan Ondok Sewu saat ini belum menjadi prioritas Desa. Selain itu, terdapat masalah pada SDM yang terbatas dan minimnya ketertarikan pemuda desa untuk mengembangkan wisata di Desa Pagergunung terutama Ondok Sewu.

Tabel 8. Hasil AHP Faktor Penyebab Gagalnya Implementasi Pembangunan Ekowisata Konyar Hill

Kriteria	Skor	Alternatif	Skor
Pengelolaan	70%	- Kepemilikan 100 % Milik Swasta	33%
		- Belum Adanya Perjanjian Kerjasama antara Pemilik dengan Pihak Desa	33%
		- Sudah Tidak Beroperasi semenjak Pandemi Covid	33%
SDM	22%	- Tidak SDM yang Mengembangkan	67%
		- Tidak ada SDM yang berpengalaman	33%
Infrastruktur	8%	- Bangunan Eksisting Tidak Terawat	100%
		- Minimnya Infrastruktur Listrik	

Permasalahan utama di Konyar Hill menjadi rumit dikarenakan desa tidak memiliki wewenang untuk mengambil alih pengelolaan. Dikarenakan kepemilikannya milik swasta. Selain itu, hal tersebut diperparah dengan adanya pandemi Covid 19, sehingga tidak adanya aktivitas wisata, dan keterlibatan peran masyarakat dalam mengelola kawasan ini membuat banyak sarana dan prasarana yang tidak terawat.

B. Minimnya Peran Serta Masyarakat

Dari hasil analisa stratifikasi tingkat hambatan yang terjadi dalam implementasi pembangunan kawasan ekowisata di 3 desa ini, menunjukkan SDM menjadi faktor utama yang menghambat pelaksanaan sebagian besar indikasi program pembangunan kawasan ekowisata yang sudah direncanakan. Dari hasil wawancara mendalam pada *stakeholder* yang menjadi sampel penelitian ini, hal tersebut diakibatkan minimnya keterlibatan partisipasi masyarakat baik mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan pembangunan, evaluasi sampai pada pemanfaatan hasilnya, dimana *community-based tourism* dipandang sebagai pendekatan yang cocok bagi ekowisata. Hal ini diakibatkan tidak adanya hubungan yang baik antar *stakeholder* terkait, yang mana bahkan dalam beberapa kawasan, *stakeholder* penting dalam pengelolaan ekowisata seperti BUMDES dan POKDARWIS tidak berjalan. Permasalahan serupa juga terlihat dalam beberapa kawasan ekowisata seperti di Tanjung Lesung [9] dan kawasan Misvonga di Zimbabwe [10] dimana tidak adanya kerjasama antara pengelola potensi ekowisata dengan masyarakat setempat sehingga kegiatan wisata dilakukan terpisah-pisah dan berjalan secara sporadis.

Salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya keterlibatan masyarakat adalah rendahnya minat generasi pemuda untuk tinggal dan mengembangkan potensi diri mereka di kawasan pedesaan [3] Dimana seharusnya peran dan partisipasi generasi pemuda diperlukan dalam setiap tahapan pembangunan desa karena dinilai menjadi faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan pembangunan desa [11]. Selain itu, adanya tawaran pekerjaan dan pendidikan di luar daerah serta fenomena pernikahan dini yang sedikit banyak mempengaruhi minat pemuda untuk berpartisipasi dalam program pembangunan desa [12]. Namun apabila pemerintah desa setempat mau memberikan ruang bagi para pemuda untuk menampilkan dan mengakomodasi ide dan gagasan mereka, sedikit banyak akan membantu menarik minat dan partisipasi mereka agar terlibat dalam pembangunan kawasan desa dikarenakan mereka merasa suara dan harapan mereka didengar oleh pemerintah desa [13].

Faktor lain yang menghambat partisipasi masyarakat adalah rendahnya kualitas dan kapasitas SDM yang dimiliki untuk menunjang pelayanan dalam bidang pariwisata. Minimnya pengetahuan dan pengalaman menjadi tantangan dalam memaksimalkan peran masyarakat dalam pembangunan ekowisata [14]. Kurangnya dukungan dan kemampuan finansial juga menjadi salah satu faktor yang menghambat pendekatan *community-based tourism* dapat terlaksana, dimana tingkat pendapatan yang dimiliki oleh suatu masyarakat akan

mempengaruhi tingkat partisipasi mereka dalam pembangunan desa, khususnya dalam bentuk swadaya uang [5]. Terlebih, perlunya intensifikasi pelaksanaan sosialisasi serta pelatihan-pelatihan teknis yang disebabkan rendahnya kesadaran dan modal pengetahuan dan kemampuan masyarakat desa menjadikan program pembangunan desa memerlukan waktu yang cukup lama [15]. Ekowisata adalah suatu perjalanan wisata ke alam dengan tujuan mengkonservasi lingkungan dan melestarikan keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan penduduk setempat [10]. Sehingga pelatihan dan pengetahuan dalam bidang konservasi dan pelestarian alam menjadi hal yang sangat fundamental untuk dimiliki masyarakat di sekitar kawasan Ekowisata.

C. Pengelolaan yang Kolaboratif

Hampir di setiap kawasan ekowisata yang akan dibangun di 3 desa ini tidak memiliki manajemen pengelolaan yang jelas. Dan pemerintah desa setempat terkesan berjalan sendiri tanpa adanya kerjasama dan kolaborasi antar *stakeholder* baik yang terdampak maupun yang memiliki kepentingan dalam pembangunan kawasan ekowisata tersebut. Hal yang ditakutkan adalah pembangunan ekowisata hanya digunakan sebagai alat pemasaran oleh pemerintah setempat untuk mengizinkan arus *modal capital* masuk melalui kontrol korporasi tanpa melibatkan komunitas dan masyarakat setempat [8]. Model pembangunan seperti ini tentu tidak akan mendapat banyak dukungan dari masyarakat dimana tidak ada mekanisme pendistribusian peran dan keuntungan yang jelas terhadap desa dan masyarakat di sekitar kawasan ekowisata [16]. Terlebih, kegiatan pemasaran yang hanya dilakukan oleh pihak pengelola dan pemerintah daerah, terbukti tidak memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan jumlah wisatawan [9]. Hal lain yang belum terlihat dalam pengelolaan kawasan ekowisata di 3 desa ini adalah faktor leadership dari berbagai *stakeholder* terkait, dimana Kepala Desa, Kepala BUMDES dan Kepala POKDARWIS pada tiap desa memiliki pengaruh dan peran sangat penting untuk menumbuhkan dan menggerakkan modal sosial agar masyarakat turut serta berperan aktif dalam pembangunan desa [17]. Namun apabila tidak ada unsur dan suasana kebaruan yang dapat dihadirkan oleh pemimpin-pemimpin tersebut, berpotensi membangun sifat apathisme yang membuat masyarakat kurang peduli dengan apa yang terjadi disekitarnya [18]. Yang pada akhirnya, apabila partisipasi masyarakat setempat tidak dilibatkan dalam manajemen pengelolaan kawasan ekowisata, khususnya bagi Negara berpenghasilan rendah dan menengah, akan berdampak pada maraknya praktek-praktek yang dapat merusak ekosistem dan mendegradasi lingkungan [19], seperti yang terjadi pada kerusakan ekosistem mangrove di wilayah pesisir Surabaya dan pencemaran lingkungan pada Kawasan pesisir pantai Kawasan ekowisata Kuranji Dalang [20].

Hal penting yang dapat dipertimbangkan untuk kelanjutan penelitian ini adalah pertama, bagaimana model keterlibatan masyarakat yang sesuai dalam pelaksanaan setiap komponen kegiatan pada masing-masing kawasan ekowisata seperti

pengembangan daya tarik wisata, pemenuhan kebutuhan aksesibilitas dan fasilitas wisata [4]. Kedua, bagaimana dukungan finansial yang dibutuhkan bagi masyarakat di masing-masing desa untuk dapat berpartisipasi dalam ekosistem industri ekowisata ini yang sebagian besar berprofesi sebagai petani dan masih belum memiliki akses terhadap kredit perbankan [2]. Ketiga, bagaimana mekanisme pendistribusian keuntungan dan ownership antara pihak desa, BUMDES sebagai pengelola kawasan ekowisata dan masyarakat setempat, termasuk pemberdayaan masyarakat yang berpotensi menjadi tenaga kerja dan penciptaan peluang-peluang bisnis yang sesuai dengan kemampuan masyarakat setempat [9]. Dengan adanya Perencanaan bisnis (*bussiness plan*) yang jelas dan terukur yang menjadi pedoman sekaligus sebagai alat untuk menjalin kerjasama yang konstruktif dan saling menguntungkan dengan pihak lain baik pemerintah, perbankan/lembaga keuangan, investor, dan sebagainya agar dapat mewujudkan usaha mandiri dalam pengelolaan ekowisata yang berkelanjutan [21].

Kekurangan dari penelitian ini adalah penelitian yang berfokus pada sebuah studi kasus melalui pendekatan kualitatif sehingga temuan – temuan dalam penelitian ini bersifat mendalam dan spesifik pada apa yang sebenarnya menghambat implemmentasi perencanaan pembangunan kawasan pedesaan di 3 desa di kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar. Sehingga hasil dari temuan penelitian ini tidak dapat di generalisir pada studi kasus lain. Selain itu, dikarenakan metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *stakeholder sampling*, sehingga apa yang sebenarnya terjadi dari sudut pandang masyarakat setempat masih belum terakomodasi dalam penelitian ini.

IV. KESIMPULAN

Perencanaan kawasan ekowisata di 3 desa yang tersusun dalam Rencana Pembangunan Kawasan Pedesaan (RPKP) Kecamatan Kesamben seakan mengalami kebuntuan pada tahap implementasinya, hal ini dapat dilihat dari mayoritas indikasi program dan rencana aksi yang tidak berjalan. Kesimpulan dari hasil analisa penelitian ini menunjukkan apabila program-program pembangunan desa ingin terlaksana dengan baik, Keterlibatan peran dan partisipasi masyarakat menjadi sangat krusial. Seberapa jauh partisipasi masyarakat mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sampai pada tahap pemanfaatan program menjadikan tolak ukur keberhasilan program pembangunan kawasan pedesaan. Terlebih dibutuhkan peran dan partisipasi generasi pemuda tidak hanya dari sisi sumber daya manusianya yang unggul, tetapi juga unsur-unsur kebaruan dan inovasi yang dibutuhkan dalam pembangunan kawasan pedesaan. Oleh karenanya, dukungan-dukungan teknis, bagi para pemuda desa yang terlibat, yang berupa pelatihan dan peningkatan pengetahuan, kapasitas dan kapabilitas di bidang ekowisata menjadi prasyarat wajib pembangunan kawasan desa ekowisata. Di sisi lain, kolaborasi antar *stakeholder* terkait juga menjadi kunci dalam pembangunan kawasan pedesaan. Dengan adanya

pembagian dan distribusi peran yang jelas antara Pemerintah Desa, BUMDES dan masyarakat tidak hanya dalam hal pengelolaan, pemasaran dan rantai pasok industri penunjang wisatanya, tetapi juga memastikan keberlanjutan kawasan ekowisata melalui usaha-usaha konservasi sumber daya alam yang dikawal partisipasi masyarakat. Oleh karenanya, kesiapan SDM, leadership dan profesionalitas yang dimiliki para *stakeholder* terkait menjadi kunci kesuksesan implemmentasi pembangunan kawasan pedesaan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih segala pihak yang telah terlibat dalam penelitian, mulai dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar dan Pemerintah Desa Jugo, Pagergunung dan Sukoanyar

DAFTAR PUSTAKA

- [1] R. E. Samani, S. Malekshahi, dan A. Poursaeed, "Development Strategies for Rural Tourism in Mishkhas Village," *International Journal of Agricultural Management and Development*, vol. 6, no. 3, hlm. 257–264, 2016, [Daring]. Tersedia pada: www.ijamad.iaurasht.ac.ir
- [2] A. M. Okunola, "Nigeria: Positioning Rural Economy for Implementation of Sustainable Development Goals," *Turkish Journal of Agriculture-Food Science and Technology*, vol. 4, no. 9, hlm. 752–757, 2016, [Daring]. Tersedia pada: www.agrifoodscience.com,
- [3] T. Adamov *dkk.*, "Rural Tourism in Marginimea Sibiului Area—A Possibility of Capitalizing on Local Resources," *Sustainability (Switzerland)*, vol. 15, no. 1, Jan 2023, doi: 10.3390/su15010241.
- [4] G. I. Primadona, "PERANCANGAN KAWASAN TERPADU WISATA ALAM DAN BUDAYA Abstraksi," *Jurnal Arsitektur Universitas Bandar Lampung*, vol. 1, no. 2, hlm. 44–58, 2011.
- [5] A. A. Adriansyah, N. J. Firdausi, dan T. D. Wulan, "Pengenalan Perencanaan Program Desa Berbasis Bukti: Studi Di Desa Murtajih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan," *Jurnal Ilmiah Pangabdhi*, vol. 5, no. 2, hlm. 62–67, 2019.
- [6] H. Prasetyo dan H. Sulistyarto, "Arahan Pengembangan Kawasan Desa Wisata di Desa Tulungrejo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri," *Jurnal Teknik ITS*, vol. 6, no. 2, hlm. 614–617, 2017.
- [7] H. C. Diartho, "Pengembangan Wilayah Perdesaan Berbasis Pada Potensi Sumber Daya Alam di Kabupaten Bondowoso," *EKONOMIKAWAN: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan*, vol. 18, no. 2, hlm. 102–122, 2018.
- [8] R. A. Atanga, "STAKEHOLDER VIEWS ON SUSTAINABLE COMMUNITY-BASED ECOTOURISM: A CASE OF THE PAGA CROCODILE PONDS IN GHANA," *GeoJournal of Tourism and Geosites*, vol. 25, no. 2, hlm. 321, 2019, doi: 10.30892/gtg.2.
- [9] F. Qolbi dan A. Yudhi K, "Arahan Pengembangan Pariwisata di Kawasan Tanjung Lesung Berdasarkan Partisipasi Masyarakat," *Jurnal Teknik ITS*, vol. 7, no. 1, hlm. 14–18, 2018.
- [10] G. Musasa dan S. Mago, "Challenges of rural tourism development in Zimbabwe: A case of the Great Zimbabwe-Masvingo district," 2014. [Daring]. Tersedia pada: <http://www.ajhtl.com>
- [11] J. A. Adistana dan H. Sulistyarto, "Arahan Pengembangan 'Kampung Majapahit' sebagai Desa Wisata pada Kawasan Cagar Budaya Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto," *Jurnal Teknik ITS*, vol. 5, no. 2, hlm. 873–879, 2016.
- [12] A. D. Susanti, "Pola Partisipasi Warga dalam Pengembangan Desa Wisata Umbul Sidomukti Kabupaten Semarang," *MODUL*, vol. 15, no. 1, hlm. 853–2877, 2015.
- [13] D. Akbar dan T. Setiandika Igiasi, "Peran Pemuda dalam Pengembangan Wisata di Desa Pongkar Kabupaten Karimun," *KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, vol. 3, no. 2, hlm. 193–211, Mar 2019, doi: 10.31629/kemudi.v3i2.856.
- [14] Rusiani, "Pemberdayaan Masyarakat melalui Ekowisata di Resort Wonolelo, Taman Nasional Gunung Merbabu: Tantangan dan Strategi," *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*, vol. 14, no. 1, hlm. 51–60, 2018, [Daring]. Tersedia pada: <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/pwk/index>
- [15] E. Damayanti, M. S. Soeaidy, dan H. Ribawanto, "STRATEGI CAPACITY BUILDING PEMERINTAH DESA DALAM PENGEMBANGAN POTENSI KAMPOENG EKOWISATA BERBASIS MASYARAKAT LOKAL," *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, vol. 2, no. 3, hlm. 464–470.
- [16] A. C. Rompas, "PENGEMBANGAN POTENSI DESA SEBAGAI TUJUAN EKOWISATA DI DESA LENGANENG KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE," *Jurnal Warna*, vol. 1, no. 1, hlm. 78–94, 2017.
- [17] T. Ardilah, M. Makmur, dan I. Hanafi, "UPAYA KEPALA DESA UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA (Studi di Desa Bareng Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang)," *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, vol. 2, no. 1, hlm. 71–77.
- [18] O. Gumolung, J. Lumolos, dan D. Monintja, "INOVASI KEPALA DESA DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PEMBANGUNAN DESA (STUDI DI DESA ALO UTARA KECAMATAN RAINIS KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD)," *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, vol. 3, no. 3, hlm. 1–15, 2019.
- [19] C. Carrascosa-López, M. Carvache-Franco, J. Mondéjar-Jiménez, dan W. Carvache-Franco, "Understanding motivations and segmentation in ecotourism destinations. Application to natural parks in Spanish mediterranean area," *Sustainability (Switzerland)*, vol. 13, no. 9, Mei 2021, doi: 10.3390/su13094802.

- [20] J. Faktor *dkk.*, “Emasains Jurnal Edukasi Matematika dan Sains”, doi: 10.5281/zenodo.7367520.
- [21] A. Yakim, Sukardi, Amiruddin, dan H. Sa'diyah, “PENINGKATAN KAPASITAS BUMDES DALAM PENYUSUNAN BUSINESS PLAN BAGI PENGELOLAAN KAWASAN EKOWISATA HUTAN BERKELANJUTAN DI DESA SESAOT KECAMATAN NARMADA KABUPATEN LOMBOK BARAT”.